

ABSTRAK

BEBY YOLANDA RITONGA

Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Aturan penebangan kayu di kawasan hutan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan hutan lindung oleh peraturan perundang-undangan Indonesia yang agresif tentu saja tersebar luas, namun dalam hal ini penulis menekankan pada dua peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban pidana atas tindakan penebangan kayu dikawasan hutan tanpa izin yang sah terdapat dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Pertanggungjawaban pidana atas tindakan menebang kayu jenis medang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3988 K/Pid.Sus-LH/2023 Bahwa demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

Disimpulkan bahwa Penggunaannya sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku. Implementasi Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan oleh Masyarakat Penggunaan fungsi hutan lindung yang dikelola oleh pemerintah kota dapat dibagi menjadi dua kelompok: a. Orang biasa yang menebang tanpa izin dari pemerintah daerah b. Kelompok tani dan kelompok masyarakat yang melakukan budidaya hutan lindung diizinkan oleh pemerintah daerah. Undang-undang No. 18 Tahun 2013 dalam ketentuan pidananya telah menentukan pertanggungjawaban individu sesuai dengan sikap tindak pelaku sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak. Bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, kayu, hutan

ABSTRACT

BEBY YOLANDA RITONGA

Forests are a very important resource not only as a source of wood, but more as a component of the environment.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and literature studies are conducted, which will then be analyzed legally.

Regulations on logging in forest areas that are permitted in laws and regulations. The regulation of protected forests by aggressive Indonesian laws and regulations is of course widespread, but in this case the author emphasizes two regulations, namely Law Number 41 of 1999 and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Criminal liability for logging in forest areas without a valid permit is contained in Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction is an individual and/or corporation that carries out organized forest destruction and/or has legal consequences in the jurisdiction of Indonesia. Criminal liability for the act of cutting down medang wood in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 3988 K/Pid.Sus-LH/2023 That such is the decision of the *judex facti* which sentences the Defendant to imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 1 (one) month

It is concluded that its use is in accordance with applicable principles and standards. Implementation of Protected Forest Functions Through Community Cultivation The use of protected forest functions managed by the city government can be divided into two groups: a. Ordinary people who cut down without permission from the local government b. Farmer groups and community groups who cultivate protected forests are permitted by the local government. Law No. 18 of 2013 in its criminal provisions has determined individual responsibility in accordance with the attitude of the perpetrator's actions, the nature of the actions carried out by the Defendant and it turns out that the *judex facti* decision in this case does not conflict with the law and/or statutes, so the cassation application is declared rejected. That because the Defendant was convicted, he was burdened to pay the court costs at the cassation level

Keywords: Accountability, wood, forest